

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi sektor publik saat ini sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten yang ada di Indonesia termasuk Kecamatan Pangkalan Baru akan memberikan kebebasan untuk mengelola dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikatakan bahwa “keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat

dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang keseluruhannya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan desa demi terwujudnya pembangunan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa, dimana semakin tinggi aturan yang diterapkan oleh perangkat desa maka akan meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini dulunya dikenal dengan nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Desa. Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan Aplikasi Siskeudes sebagai alat bantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Nomor 900/6271/SJ dan MoU16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, dengan demikian pemerintah Desa khususnya aparatur Desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien.

Fitur-fitur yang ada dalam Siskeudes dibuat sesederhana mungkin dan *user friendly* sehingga memudahkan penggunaan dalam mengoperasikan Siskeudes. Dengan diterapkannya Siskeudes diharapkan nantinya dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari Siskeudes tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif dan efisien akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat. Mutu pelayanan bagi masyarakat sangat penting karena hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah organisasi sektor publik.

Penerapan Siskeudes ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu (1) sesuai peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, (3) kemudahan penggunaan aplikasi, (4)

dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*Built-in Internal Control*), (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Disamping kelebihan tersebut, kelemahan dari Siskeudes ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan Siskeudes yang diberikan bagi para pegawai dan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga jaringan internet yang kurang memadai. Dalam setiap pengimplementasian sebuah program, sara dan prasarana menjadi suatu unsur yang diperlukan untuk mendukung berjalannya program tersebut agar pelaporan keuangan desa pada setiap tahun dapat berjalan dengan baik dan transparansi.

Kabupaten Bangka Tengah merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas wilayah  $\pm 2.280,14$  km<sup>2</sup> (bps) dan Pangkalan Baru adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bangka tengah dengan jumlah penduduk paling banyak  $\pm 49.177$  jiwa.

Menurut Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa dana desa yang diterima Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar Rp.261,661,579.00, dan khususnya Bangka Tengah memperoleh pagu sebesar Rp.46,833,209.00. penyerapan anggaran Desa di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017. Mencapai 96 Miliar rupiah dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 7 miliar rupiah berdasarkan data

yang dikelola oleh aplikasi Siskeudes oleh Dinas Pemerintahan desa, hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa kendala dalam membelanjakan anggaran desa.

Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Bangka Pos disebutkan bahwa 7 miliar dana desa tidak terpakai di Bangka Tengah hal ini dikarenakan adanya beberapa desa yang mengalami penyerapan maksimal karena adanya kendala dalam membelanjakan anggaran desa dan salah satu desa yang memiliki silva terbesar dengan sisa anggarannya yaitu Desa Mangkol Rp. 423.439.070.

Kecamatan Pangkalan baru sendiri termasuk salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Tengah yang menerima dana desa dengan jumlah yang cukup besar. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Pemerintahan Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pengelolaan Dana Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Pangkalan Baru”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang mejadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah efektifitas dalam pengelolaan dana desa (Siskeudes) berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa?
2. Apakah efisiensi dalam pengelolaan dana desa (Siskeudes) berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar masalah tidak terlalu luas, sehingga pembahasan terarah dan terfokus. Penelitian ini di fokuskan pada efektifitas dan efisiensi Siskeudes dan kualitas kinerja pemerintahan desa.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah efektifitas dalam pengelolaan dana desa (Siskeudes) berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.
2. Untuk mengetahui apakah efisiensi dalam pengelolaan dana desa (Siskeudes) berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan saran atau masukan yang berarti bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Desa mengenai pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintahan desa.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan khususnya sehingga menjadi sumber perbaikan terhadap teori yang sudah ada sebelumnya atau untuk menemukan suatu teori baru yang dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan.

### 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi terutama dalam peningkatan sistem pengelolaan keuangan desa.

## 1.6 Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran peneliti yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini mendeskripsikan tentang teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitian dari masing-masing variabel, juga teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti, menjelaskan tentang penelitian sebelumnya, kerangka teoritis dan hipotesis penelitian

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian, populasi dan sampel data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, kemudian dibuat suatu kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran-saran atau masukan agar menjadi lebih baik untuk masa yang datang.